

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2018

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS POKOK : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan menyelenggarakan urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Masyarakat

FUNGSI : Untuk Melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kota;
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak;
- i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak;
- j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota;
- k. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota;
- m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota;
- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi kota;
- o. Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kota;
- p. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- q. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- r. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk KB sesuai kearifan budaya local;
- s. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- t. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB;
- u. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber KB;
- v. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- w. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- x. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan	Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Bidang PP dan Perlindungan Anak
2	Menurunnya Kesenjangan antara Perempuan dan Laki-Laki	Indeks Pembangunan Gender	$1/3 \text{ (Angka Harapan Hidup + Indeks Pendidikan + Indeks Daya Beli)}$	Laporan Tahunan	Bidang PP dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$1/3 \text{ (Keterwakilan di Parlemen + Indeks Pengambilan Keputusan + Indeks Distribusi Pendapatan)}$	Laporan Tahunan	Bidang PP dan Perlindungan Anak
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kota yang sudah Responsif Gender}}{\text{ APBD Kota}} \times 100\%$		Bidang PP dan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya Penanganan berbagai Kasus Kekerasan dan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang diselesaikan oleh P2TP2A	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan}}{\text{Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A}} \times 100\%$	Laporan Tri Bulanan	Bidang PP dan Perlindungan Anak
		Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Kota Layak Anak (Sesuai Permeneg PPA 12 Tahun 2011		

4	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program KB	Persentase Perkawinan Usia Istri di Bawah 20 tahun (Pendewasaan Usia Perkawinan)	$\frac{\text{Jumlah Perkawinan Istri dibawah usia 20 Thn}}{\text{Jumlah Perkawinan yang Ada}} \times 100\%$	Laporan Bulanan	Bidang KB
		Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah PUS yang Menggunakan Alokon}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$		Bidang KB
		Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif MKJP}}{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}} \times 100\%$		Bidang KB